

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa konsumen yaitu konsumen merasa dirugikan terkait barang yang dibeli yaitu pembelian Silinder Head/ Dexel Mobil di Toko Maily Motor karna tidak ada itikad baik dari Pelaku Usaha untuk itu Konsumen mengadukan permasalahannya ke BPSK Kota Padang, untuk menyelesaikan permasalahannya. Pengajuan gugatan oleh konsumen ke BPSK dilakukan secara tertulis oleh konsumen ke BPSK, langkah awal Sekretariat menerima pengaduan memastikan kedudukan atau identitas pihak, lalu menyerahkan kepada Ketua BPSK untuk kemudian dibentuk Majelis olehnya. Para pihak kemudian dipanggil dan mengikuti persidangan Perkara No:053/P3K/VIII/2015, Majelis berupaya melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, karena upaya perdamaian tidak tercapai maka Majelis menawarkan memilih bentuk penyelesaian, dalam kasus ini dipilihlah penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal-Pasal yang telah dilanggar yaitu Pasal 4, melanggar hak-hak konsumen, Pasal 8 (2), Pasal 18 huruf c selain itu juga pertimbangan dari Majelis BPSK yang menghukum pihak Pelaku Usaha (Tergugat) mengembalikan uang Konsumen(Pengugat) sebanyak 70% dari jumlah harga barang, atas dasar pertimbangan bahwa label barang sudah dirusak oleh Konsumen (Pengugat) pada

saat mencoba barang Silinder Head/Dexel Mobil tersebut dan barang Silinder Head/Dexel Mobil itu sudah digunakan oleh Konsumen Majelis mempertimbangkan dikembalikan uang Konsumen (Penggugat) sebanyak 70% dengan tidak melihat kesalahan si Pelaku Usaha (Tergugat) saja tapi juga adanya kesalahan dari Konsumen selaku pembeli. .

3. Pelaksanaan putusan Majelis Hakim telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat bertanggungjawabnya para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut khususnya terhadap perkara No: 053/P3K/VIII/ 2015, pihak yang kalah yaitu Toko Maily Motor telah memberikan pengembalian uang 70% kepada konsumen, Konsumen merasa puas atas putusan yang ditetapkan BPSK

B. Saran

1. Sebagai konsumen haruslah hati-hati dan teliti dalam membeli barang agar tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan tidak menjual barang yang tidak layak pakai atau tidak bisa digunakan.
2. Pelaku usaha haruslah lebih bersikap jujur dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tidak selalu mencari keuntungan yang merugikan konsumen, dengan memikirkan agar setiap konsumen yang akan menggunakan barang/atau jasa merasa puas dan menikmati barang/jasa tersebut.
3. Bagi Pemerintah untuk dapat memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag terkait batas waktu penyelesaian sengketa, disesuaikan dengan kebutuhan BPSK, karena dalam penyelesaian sengketa Perkara No:053/P3K/VIII/2015 BPSK kurang efektifnya kinerja dari segi waktu dalam penyelesaian sengketa sejak masuknya gugatan sampai putusan waktunya

paling lambat 21 hari, disini BPSK tidak menjalankan sesuai dengan Kepmen No: 350/MPP/Kep/12/2001 dimana melebihi waktu yang telah ditetapkan.

